

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga di Kota Singkawang.

Dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya menerapkan prinsip *Good Governance*, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan *Good Governance* mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi di segala bidang pada tahun 1997. *Good Governance* adalah pengolahan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan sektor swasta. Karena pemerintahan

yang baik dapat mengatur semua aspek yang ada di sekitarnya dengan baik. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Di mana ciri-ciri tata Pemerintahan yang baik (good governance) yaitu mengikutsertakan semua; transparan dan bertanggung jawab; efektif dan adil; menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Untuk itu kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauhmana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun maksud dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Good Governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui pengawasan atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap *principal* berdasarkan peraturan yang ada. Konsep *good governance* ini pada intinya menghendaki adanya transparansi yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan yang jika berhasil diterapkan dengan baik secara otomatis akan meningkatkan kinerja pemerintah. *Good governance* dapat diartikan sebagai suatu susunan aturan yang menentukan hubungan yang tercipta antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Ada 3 prinsip utama dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipatif. Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai instansi ataupun SKPD pemerintah sangatlah penting, karena hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintah kepada para *stakeholders*.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul, **“Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?
2. Apakah penerapan prinsip transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?
3. Apakah penerapan prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?

1.3 Batasan Penelitian

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan dan terbatasnya waktu serta data yang diperoleh, maka penelitian melakukan pembatasan masalah pada:

1. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.
2. Bidang penelitian ini seluruhnya terkait dengan manajemen keuangan khususnya keuangan sektor publik dengan menekan pada analisis perbandingan kinerja keuangan dengan penerapan *good governance* terhadap kinerja keuangan yang terjadi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.
3. Pada penelitian ini penulis hanya memasukkan beberapa komponen *good governance* dalam uji pengaruh yang umum dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip partisipatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang *good governance* dan kinerja keuangan khususnya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk melatih diri menganalisis suatu masalah yang terjadi dalam suatu kasus nyata atau permasalahan yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

2. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dan juga dapat untuk memberikan informasi serta sumbangan

pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, sehingga kedepannya anggaran dapat disusun dengan lebih efektif dan dapat direalisasikan dengan lebih optimal serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

3. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada para akuntan untuk menyajikan pengungkapan yang cukup dan penjelasan yang memadai mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

4. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

Universitas Tanjungpura